

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai sistem pendukung dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 3 Oktober 2017, memuat 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%). Secara umum, hasil pemeriksaan BPK tersebut mengungkapkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif, dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun, potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun, dan terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Kemudian dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun. Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah senilai Rp509,61 miliar (2%).

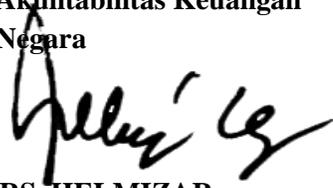
Khususnya pada Kementerian/Lembaga/Badan mitra kerja Komisi VI terdapat 9 entitas Kementerian dan Lembaga, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha yang keseluruhannya sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Total Anggaran Belanja mitra Komisi VI sebesar Rp 21.696.353.071.365,00 dan **Realisasi Belanja** sebesar Rp8.245.368.989.860,00. **Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** pada Mitra kerja Komisi VI Tahun 2016 sebesar Rp1.629.602.161.643,00. Sedangkan klasifikasi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada mitra Komisi VI terdapat **kerugian negara** sebesar Rp11.521.110.000,00, **potensi kerugian** negara sebesar Rp444.201.000,00 dan **kekurangan penerimaan** negara sebesar Rp7.179.380.000,00.

Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan oleh Komisi VI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Komisi VI sebagai fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Oktober 2017

**Kepala Pusat Kajian
Akuntabilitas Keuangan
Negara**



DRS. HELMIZAR

NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar Kepala Pusat KAKN.....	i
2.	Daftar Isi.....	iv
3.	Ringkasan Kementerian/Lembaga.....	ix
4.	Telaahan Kementerian.....	1
4.1.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1
4.1.1	Gambaran Umum.....	1
4.1.2	Daftar Temuan.....	3
4.1.3	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	5
4.3.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang	7
4.3.1	Gambaran Umum.....	7
4.3.2	Daftar Temuan.....	9
4.3.3	Sistem Pengendalian Intern.....	11
4.3.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	15
4.4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam	19
4.4.1	Gambaran Umum.....	19
4.4.2	Daftar Temuan.....	21
4.4.3	Sistem Pengendalian Intern.....	23
4.4.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	27
4.5	Badan Standardisasi Nasional	33
4.5.1	Gambaran Umum.....	33
4.5.2	Daftar Temuan.....	35
4.5.3	Sistem Pengendalian Intern.....	37
4.6	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	39
4.6.1	Gambaran Umum.....	39
4.6.2	Daftar Temuan.....	41
4.6.3	Sistem Pengendalian Intern.....	43
4.6.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	53
4.7	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah	61
4.7.1	Gambaran Umum.....	61
4.7.2	Daftar Temuan.....	63
4.7.3	Sistem Pengendalian Intern.....	65
4.7.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	73
4.8	Kementerian Perdagangan	77
4.8.1	Gambaran Umum.....	77
4.8.2	Daftar Temuan.....	79

4.8.3	Sistem Pengendalian Intern.....	81
4.8.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	95
4.9	Kementerian Perindustrian	101
4.9.1	Gambaran Umum.....	101
4.9.2	Daftar Temuan.....	103
4.9.3	Sistem Pengendalian Intern.....	105
4.9.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	109
4.10	Komisi Pengawasan Persaingan Usaha	129
4.10.1	Gambaran Umum.....	129
4.10.2	Daftar Temuan.....	131
4.10.3	Sistem Pengendalian Intern.....	133
4.10.4	Kepatuhan Terhadap Undang-Undang.....	143

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BKPM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

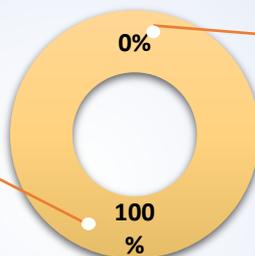
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 1.653.035.066,00.
- **Anggaran Belanja**
Rp 488.465.562.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 437.560.634.835,00 (89,58%)

NERACA

- **Aset**
Rp 594.838.338.392,00
- **Kewajiban**
Rp 7.658.850.411,00
- **Ekuitas**
Rp 587.179.487.981,003



**Kepatuhan
Perundang-undangan
1 Temuan**



**Sistem Pengendalian Intern
0 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• **Akuntansi dan Pelaporan**

0 Permasalahan

• **Pelaksanaan Anggaran**

0 Permasalahan

• **Kelemahan Struktur**

0 Permasalahan

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• **Administrasi**

1 Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BKPM Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengadaan Pengembangan Aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik Tahun 2016 Senilai Rp2.611.928.000,00 Telah Diserahterimakan Sebelum Dilakukan <i>User Acceptance Test</i>

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan BKPM yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan Kepatuhan nomor 1.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BPKS yang diperiksa dengan Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

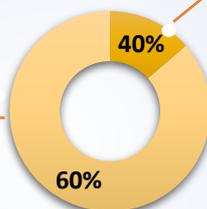
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 17.323.326.052,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 240.166.124.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 140.212.960.992,00 (58 %)

NERACA

- **Aset**
Rp 2.538.778.025.695,00
- **Kewajiban**
Rp 269.309.700,00
- **Ekuitas**
Rp 2.538.508.715.995,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
6 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

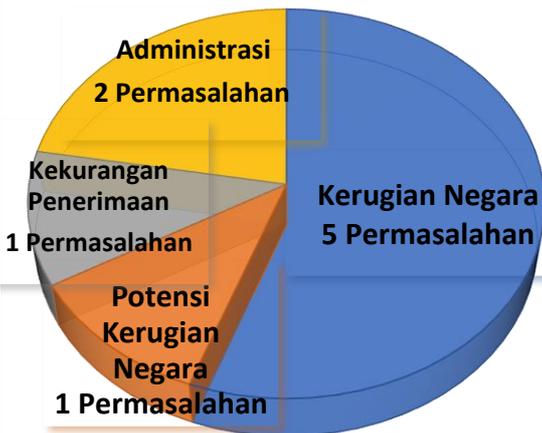
Sistem Pengendalian Intern

- **Pelaksanaan Anggaran**

3

Permasalahan

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



- **Kerugian Negara**

2.579,47
Juta

- **Potensi Kerugian Negara**

27,97
Juta

- **Kekurangan Penerimaan**

252,8
Juta

- **Administrasi**

2
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BPKS Tahun 2016

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Pendapatan Negara	
1	Pengelolaan pendapatan sewa atas pemanfaatan aset BPKS belum optimal sebesar Rp44.490.630,00
Sistem Pengendalian Belanja	
2	Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal sebesar Rp21.663.913.800,00
Sistem Pengendalian Aset	
3	Pemanfaatan aset Eks Pelindo yang dikelola oleh BPKS sebesar Rp16.310.501.056,00 belum optimal
4	Kegiatan pengamanan dan pencatatan aset tetap belum maksimal sebesar Rp3.494.091.007,00
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Belanja Barang	
1	Penetapan dan pembayaran honorarium output kegiatan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp47.921.000,00
2	Kelebihan pembayaran atas kegiatan Sabang Marine Festival sebesar Rp94.944.000,00
3	Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya sebesar Rp229.350.000,00
Belanja Modal	
4	Kelebihan pembayaran atas sebelas paket pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi sebesar Rp1.169.641.213,65
5	Penyelesaian empat paket pekerjaan fisik terlambat dan belum dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp252.083.056,68
6	Pengadaan pompa pada kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Baku di Kawasan Industri Balohan tidak sesuai spesifikasi teknis sebesar Rp1.065.600.000,00

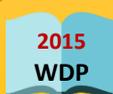
Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan BPKS yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 2, dan 4. Kepatuhan nomor 4 dan 6.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BP Batam dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).



BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

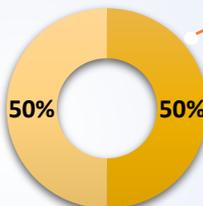
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 952.443.330.107,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 1.781.100.865.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 1.417.189.460.848,00 (79,57%)

NERACA

- **Aset**
Rp 28.085.949.585.300,00
- **Kewajiban**
Rp 1.360.981.297.066,00
- **Ekuitas**
Rp 26.724.968.288.234,00



**Kepatuhan
Perundang-undangan
4 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

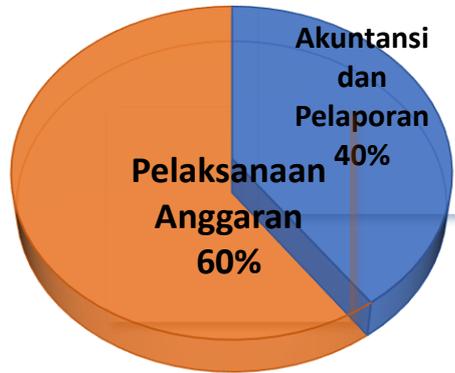
Sistem Pengendalian Intern

- Akuntansi dan Pelaporan

2
Permasalahan

- Pelaksanaan Anggaran

3
Permasalahan

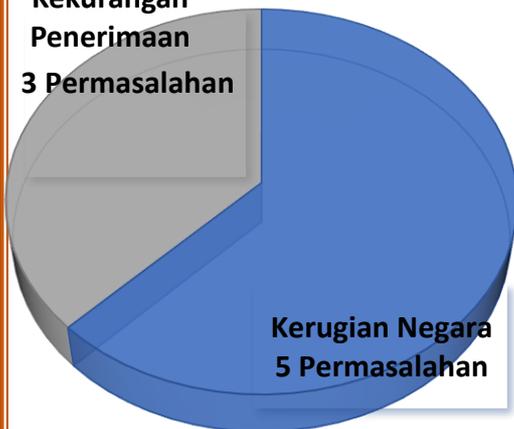


Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

Kekurangan Penerimaan
3 Permasalahan

- Kerugian Negara

2.051,91
Juta



- Kekurangan Penerimaan

1.649,63
Juta

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BP Batam Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Pendapatan Negara	
1	Pengelolaan Pendapatan KSO Jasa Pandu dan Tunda Kurang Memadai
2	Tarif Jasa Layanan Kepelabuhanan dan Layanan Jasa Cargo Belum Sesuai Peraturan Kepala BP Batam
Sistem Pengendalian Aset	
3	Pengendalian atas Pengelolaan Lahan dan Piutang UWTO pada Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam Belum Memadai
Sistem Pengendalian Hutang	
4	Penyajian Hutang Kepada Pihak Ketiga Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp19.428.104.160,64
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Pendapatan Negara	
1	Pendapatan dari KSO dan Jasa Sewa Kurang Diterima Minimal Sebesar Rp1.355.543.097,50
2	Kelebihan Pembayaran atas Honor Pengelola Keuangan Tahun 2016 Sebesar Rp89.037.000,00
3	Kelebihan Pembayaran atas Sepuluh Paket Pekerjaan Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Sebesar Rp272.812.098,39 dan Denda Keterlambatan atas Pengadaan Jasa Konsultansi Sebesar Rp34.332.000,00 Belum Dipungut
4	Kelebihan Pembayaran atas Sepuluh Paket Belanja Modal Sebesar Rp1.690.079.056,90 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp259.764.035,84 Belum Dipungut

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Perundang-undangan atas Laporan Keuangan BP Batam yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 3, dan 4. Kepatuhan nomor 1, dan 4.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN STANDARISASI NASIONAL TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK BSN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WDP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

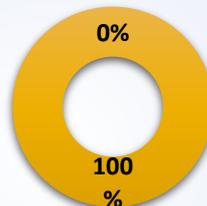
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 19.022.268.750
- **Anggaran Belanja**
Rp 126.178.139.000.
- **Realisasi Belanja**
Rp 119.816.128.032 (94,96)

NERACA

- **Aset**
Rp 29.663.728.463
- **Kewajiban**
Rp 950.331.129
- **Ekuitas**
Rp 28.713.397.334

Kepatuhan
Perundang-undangan
0 Temuan



Sistem Pengendalian Intern

1 Temuan



PERMASALAHAN

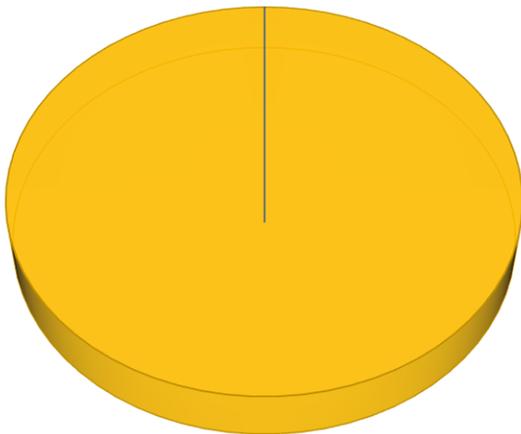
Sistem Pengendalian Intern

**Pelaksanaan
Anggaran**

1

Permasalahan

Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• **Kerugian
Negara**

0
Juta

• **Potensi
Kerugian
Negara**

0
Juta

• **Kekurangan
Penerimaan**

0
Juta

• **Administrasi**

0
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK BSN Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Penyelenggaraan Kegiatan Akreditasi Tidak Sepenuhnya Sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Peraturan-undangan atas Laporan Keuangan BSN yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian BUMN dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

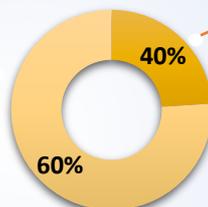
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 3.221.841.588,00 .
- **Anggaran Belanja**
Rp 249.922.667.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 190.799.181.000,00 (93,26)

NERACA

- **Aset**
Rp 476.611.753.763
- **Kewajiban**
Rp 2.933.661.979
- **Ekuitas**
Rp 2.933.661.979

Sistem Pengendalian Intern
6 Temuan



Keputusan Perundang-undangan
4 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

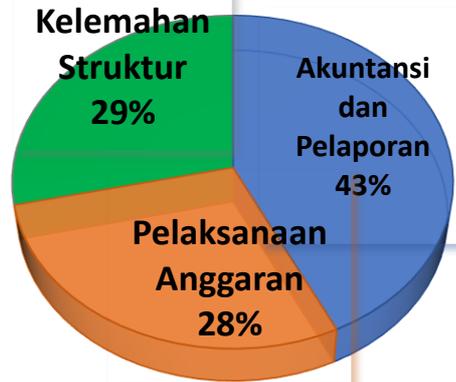
3
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

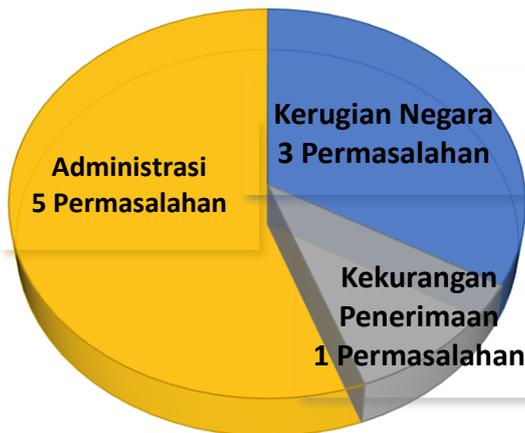
2
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

191,76
Juta

• Kekurangan Penerimaan

4.170,19
Juta

• Administrasi

5
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian BUMN Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah	
1	Pengendalian Sewa Tanah dan/atau Bangunan Gedung Kantor Kementerian BUMN Belum Memadai
Sistem Pengendalian Aset	
2	Pengelolaan Persediaan Kementerian BUMN Belum Memadai
3	Pengelolaan Aset Tetap Kementerian BUMN Belum Memadai
Kegiatan Pengawasan	
4	Pengembalian Sisa Dana Kegiatan Program BL Peduli senilai Rp22.862.013.844,87 Berlarut-Larut
5	Belum Seluruh BUMN Menyampaikan Laporan PKBL dan Pengelolaan PK Belum Optimal sehingga Terdapat Angsuran dari Mitra Binaan yang Belum Teridentifikasi Minimal Sebesar Rp15.433.662.704,00
6	Pembinaan KBUMN kepada BUMN-BUMN dan Koordinasi Antar Lembaga untuk Penyelesaian BPYBDS Menjadi PMN Belum Efektif, serta Terdapat BPYBDS yang Menjadi Beban Operasional BUMN Penerima
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Pendapatan Negara dan Hibah	
1	Terdapat Penginapan pada Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang Dibiayai Pihak Ketiga/BUMN
2	Kekurangan Volume dalam Pengadaan Paket Video Conference Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp37.500.000,00
3	Pengadaan Jasa Konsultan <i>Assesment</i> Jaringan dan <i>Data Center</i> Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Minimal Sebesar Rp25.734.500,00
4	Perencanaan dan Pelaksanaan Jasa Perawatan Gedung, Tata Graha dan Pengemudi Belum Sesuai Ketentuan

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Perundang-undangan atas Laporan KBUMN yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 5, dan 6. Kepatuhan 1, 2, 3, dan 4.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian Koperasi dan UKM dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP-DPP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

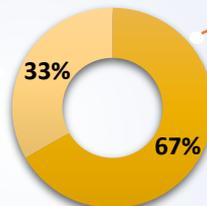
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 267.506.756.327
- **Anggaran Belanja**
Rp 1.065.438.716.000.
- **Realisasi Belanja**
Rp 956.784.284.430 (89,80)

NERACA

- **Aset**
Rp 2.679.838.357.169
- **Kewajiban**
Rp 17.293.154.112
- **Ekuitas**
Rp 2.662.545.203.057



**Kepatuhan
Perundang-undangan
2 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

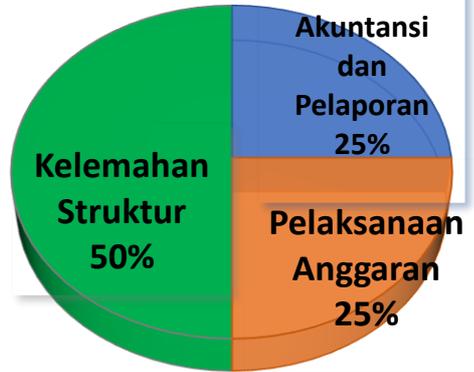
1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan

• Kerugian Negara

1.336,74
Juta

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK KUKM Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
1	Pengendalian dan Manajemen Kas BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir - KUMKM Belum Optimal
2	Penatausahaan, Pencatatan dan Pelaporan Persediaan pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Belum Memadai
3	Pencatatan dalam Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Senilai Rp2,31 Milyar yang Tidak Jelas Kelanjutan Pembangunannya
4	Pembayaran Kembali atas Dana Penjaminan yang Macet Senilai Rp593,49 Juta Belum Dikembalikan ke BLU LPDB
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Belum Sesuai Ketentuan dan Berindikasi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp177,76 Juta.
2	Aset Lain-Lain Berupa Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu-KUMKM di Provinsi Papua Senilai Rp3,94 Milyar Tidak Jelas Penyelesaiannya

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan atas Laporan Keuangan KUMKM yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan temuan Kepatuhan 1, dan 2.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perdagangan Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

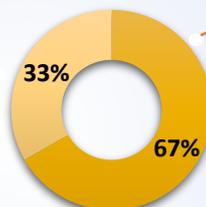
- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 101.109.834.116,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 3.670.096.341.000,00.
- **Realisasi Belanja**
Rp 2.799.141.874.849,00 (76,27)

NERACA

- **Aset**
Rp 5.548.437.619.706
- **Kewajiban**
Rp 28.172.198.477
- **Ekuitas**
Rp 5.520.265.421.229



**Kepatuhan
Perundang-undangan
2 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

4 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian Perdagangan Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Pendapatan Negara dan Hibah	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Balai Kalibrasi Belum Memadai
2	Hibah Senilai Rp94,93 Miliar Belum Ada Berita Acara Serah Terima
Sistem Pengendalian Aset	
3	Pengelolaan Persediaan Belum Memadai
4	Penatausahaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp3.233.936.951,00 pada 16 Satker Dana Dekonsentrasi dan 12 Satker Dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Belum Memadai.
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Realisasi Belanja Barang Berupa Delapan Pekerjaan Jasa Konsultansi Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp1,43 Miliar dan Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya Senilai Rp216,00 Juta
2	Realisasi Belanja Modal Berupa 13 Paket Pengadaaan Peralatan dan Mesin serta Pembangunan Sarana Distribusi dan Logistik Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp 1,29 Miliar dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp414,67 Juta

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan temuan Kepatuhan 1, dan 2.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Kementerian Perindustrian Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK Kementerian Perindustrian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

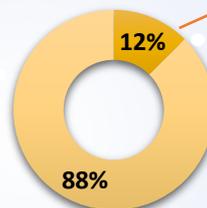
Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 243.626.725.079,00
- **Anggaran Belanja**
Rp 3.019.263.184.000,00
- **Realisasi Belanja**
Rp 2.069.390.608.391,00 (68,54)

NERACA

- **Aset**
Rp 5.915.599.801.351,00
- **Kewajiban**
Rp 37.057.217.874,00
- **Ekuitas**
Rp 5.878.542.583.477,00

 **Kepatuhan
Perundang-undangan
7 Temuan**



Sistem Pengendalian Intern

1 Temuan



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

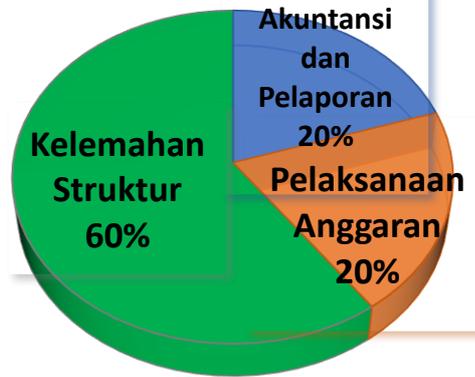
1
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

1
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

2
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

2.623,52
Juta

• Potensi Kerugian Negara

416,24
Juta

• Kekurangan Penerimaan

692,65
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK Kementerian Perindustrian Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Pendapatan Negara	
1	Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kurang Memadai
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Penerimaan Negara	
1	Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp12,53 Miliar pada Enam Satuan Kerja Terlambat Disetorkan ke Kas Negara
Belanja Barang	
2	Realisasi Belanja Barang Berupa Pekerjaan Jasa Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp906,18 juta dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Belum Dikenakan Senilai Rp78,08 Juta
3	Realisasi Belanja Barang Berupa Pembayaran Output Kegiatan pada Lima Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 Senilai Rp1,52 Miliar
Belanja Modal	
4	Realisasi Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pembangunan <i>Tank Farm</i> dan Penguncian Wesel Terjadi Kekurangan Volume Pekerjaan Senilai Rp416,24 Juta dan Denda Keterlambatan Belum Dikenakan Senilai Rp362,07 Juta
5	Realisasi Belanja Modal Berupa Pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (<i>Solar Cell</i>) Kapasitas 60 KVA Terjadi Kelebihan Pembayaran Senilai Rp198,33 Juta Dan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Kurang Dikenakan Senilai Rp252,48 Juta
Aset Tetap	
6	Alat-alat laboratorium pada Pusat Inovasi Logam Morowali dan Politeknik Industri Morowali Pengadaan Tahun 2015 Belum Dapat Dimanfaatkan Senilai Rp65,47 Miliar
7	Bentuk Kerjasama Pemanfaatan Aset pada Pusat Inovasi Kelapa Sawit Kawasan Industri Sei Mangke antara Kementerian Perindustrian dengan PTPN III Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp36,62 Miliar

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1. dan temuan Kepatuhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.

HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2016



Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2016 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LK dengan memperhatikan:

- Kesesuaian LK KPPU dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam LK sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan SAP;
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan; dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

2014
WTP

2015
WTP

BPK memberikan opini TA 2016:
**Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP)**

Laporan Realisasi Anggaran

- **Pendapatan (PNBP)**
Rp 23.695.044.558
- **Anggaran Belanja**
Rp 139,452,216,000
- **Realisasi Belanja**
Rp 114,473,856,483 (82,09)

NERACA

- **Aset**
Rp 54,711,035,576
- **Kewajiban**
Rp 4,835,495,177
- **Ekuitas**
Rp 49,875,540,399

 **Kepatuhan
Perundang-undangan
3 Temuan**

50%

50%

**Sistem Pengendalian Intern
3 Temuan**



PERMASALAHAN

Sistem Pengendalian Intern

• Akuntansi dan Pelaporan

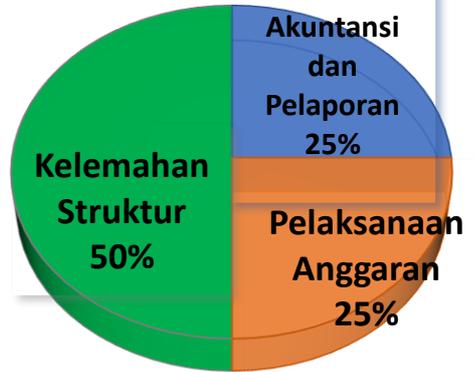
2
Permasalahan

• Pelaksanaan Anggaran

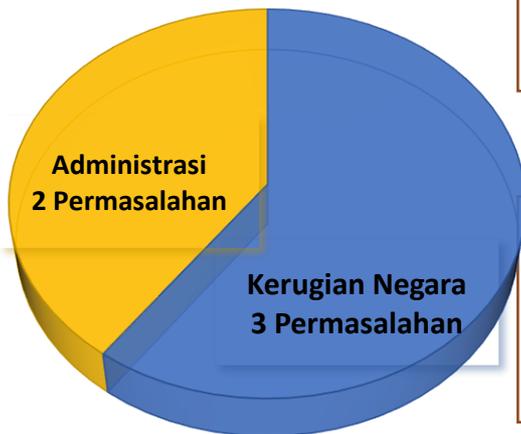
2
Permasalahan

• Kelemahan Struktur

4
Permasalahan



Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan



• Kerugian Negara

15,76
Juta

• Administrasi

2
Permasalahan

Berikut ini merupakan hasil temuan yang diungkap oleh BPK RI atas pemeriksaan LK KPPU Tahun 2016:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Internal	
Sistem Pengendalian Belanja	
1	Pertanggungjawaban Belanja Barang Belum Sepenuhnya Memadai
Sistem Pengendalian Aset	
2	Pengendalian Pencatatan Persediaan KPPU Kurang Memadai
3	KPPU Belum Menyusun Petunjuk Teknis Akuntansi Terkait Pendapatan dan Piutang Denda yang Mengacu pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat serta Pengelolaan Piutang Denda Belum Tertib
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
Belanja Negara	
1	Jumlah Hari Perjalanan Dinas Luar Negeri Pegawai KPPU Sebesar Rp261.733.523,20 Melebihi Jumlah Hari yang Diizinkan
2	Penyelenggaraan Kegiatan Konsinyering oleh Direktorat Merger KPPU Belum Sepenuhnya Sesuai dengan Ketentuan
Aset	
3	Penanganan Kasus Kerugian Negara Terkait Ikatan Dinas di KPPU Belum Optimal dan Terdapat Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara yang Belum Ditetapkan

Temuan yang dibahas lebih lanjut pada pokok-pokok kelemahan SPI dan Kepatuhan atas Perundang-undangan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian yang ditemukan oleh BPK RI yaitu temuan SPI nomor 1, 2, dan 3. dan temuan Kepatuhan 1, 2, dan 3.